



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGESEHAN RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2016 - 2017**

TANGGAL 23 AGUSTUS 2016

Tahun Sidang	: 2016 - 2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Selasa, 23 Agustus 2016.
Pukul	: 15.10 WIB s/d 16.10 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
Acara	: Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016 – 2017.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 30 orang, izin 3 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016 - 2017, sebagai berikut :
1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekearifan Budaya yang diusulkan oleh Pemerintah sebagaimana yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.;
 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU tentang Jabatan Hakim yang diusulkan oleh Komisi III.
 3. Melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang terkait dengan Ketahanan Pangan, Narkotika, Kebakaran Hutan, dan Pemerintah Daerah dengan mengundang pihak-pihak terkait dengan undang-undang tersebut.
 4. Melakukan penyebarluasan/sosialisasi Undang-Undang ke beberapa daerah.
 5. Persiapan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
 6. Workshop terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- B. Tanggapan Anggota Terhadap Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 :
1. Mengusulkan agar Badan Legislasi dapat mengadakan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan banyaknya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh masyarakat.
 2. Terhadap kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang telah dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan sebelumnya sangat diapresiasi oleh masyarakat, kiranya hasil rekomendasi dari kegiatan tersebut dapat disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui forum Rapat Paripurna agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
 3. Diusulkan agar dapat mengundang Badan Keahlian Dewan (BKD) terkait dengan program kerjanya untuk memberikan *supporting* terhadap kegiatan dewan.
 4. Terkait dengan adanya agenda kunjungan kerja ke luar negeri akan dilakukan melalui 3 (tiga) skema pengajuan, diantaranya melalui pembahasan RUU tentang Kekearifan Budaya.
 5. Kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri difokuskan untuk dapat menghasilkan *output* yang secara nyata dapat memberikan manfaat kelembagaan DPR khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
 6. Mengusulkan agar dalam pelaksanaan kegiatan workshop/FGD terkait dengan revisi undang-undang KPK dapat mengundang kembali para pakar yang diundang pada saat harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang KPK tersebut.

7. Terkait dengan kegiatan workshop nasional, kiranya dapat juga mengundang lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyetujui rancangan jadwal rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan.
2. Memberikan kewenangan kepada Pimpinan Badan Legislasi untuk melakukan perubahan jadwal sesuai dengan kebutuhan.
3. Menyetujui mekanisme penyampaian laporan hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang oleh Pimpinan Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna DPR RI.
4. Menyetujui pelaksanaan Workshop Nasional tentang Revisi UU KPK dengan susunan kepanitian sebagai berikut :

Ketua Pengarah: Arif Wibowo

Wakil Ketua : Firman Soebagyo, SE., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno

2. H. Asrul Sani, SH., M.Si.

3. Dr. Rufinus Hotmaulana H, SH., M.M., M.H.

Pelaksana : Sekretariat Baleg dan Tenaga Ahli Baleg

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Jakarta, 23 Agustus 2016

AN. KETUA RAPAT /

SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H

NIP.19670127 199803 1 001